

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA PAINAN

(402004)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021



Alamat :

Jl. Dr. Moh. Hatta Painan - Pos 25611

Telp. (0756) 21307 Fax (0756) 21707

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Painan Tahunan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang telah diubah dengan PMK nomor 222/PMK.05/2016. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Painan, 03 Januari 2022

Sekretaris,

Rahmel Fitri, SE.,SH.

NIP. 19830711.200604.1.001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel dan Lampiran	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	xi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
V. Catatan atas Laporan Keuangan	16
A. Penjelasan Umum	16
A.1. Dasar Hukum dan Peraturan.....	16
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Painan	18
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
A.4. Basis Akuntansi	19
A.5. Dasar Pengukuran	19
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	20
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	33
B.2. Belanja Negara.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.	46
Laporan Operasional periode TA 2021 disandingkan dengan Laporan Operasional periode TA 2020.....	46
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	46
D.2. Beban Pegawai	46
D.3. Beban Persediaan	47

D.4.	Beban Barang dan Jasa	48
D.5.	Beban Pemeliharaan	49
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	49
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
D.8.	Kegiatan Non Operasional	51
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	52
Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.....		
E.1.	Ekuitas Awal	52
E.2.	Surplus/ (Defisit) LO	52
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	52
E.3.1.	Koreksi Atas Reklasifikasi	52
E.3.2.	Selisih Revaluasi Aset	53
E.3.3.	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	53
E.3.4.	Koreksi Lain-lain	53
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	53
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)	54
E.4.2.	Transfer Keluar / Transfer Masuk	54
E.4.3.	Pengesahan Hibah Langsung	55
E.5.	Ekuitas Akhir.....	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	56
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	56
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	56
F.2.1.	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	56
F.2.2.	Rekening Pemerintah.....	56
F.2.3.	Revisi DIPA	56
F.2.4.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB.....	57
F.2.5.	Monitoring Aplikasi e-Rekon&LK	57

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan TA 2020	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	2
Tabel 3 Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	3
Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	4
Tabel 5 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6 Penggolongan Kualitas Piutang	23
Tabel 7 Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	27
Tabel 8 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	29
Tabel 9 Revisi Anggaran Tahun 2021	32
Tabel 10 Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 31 Desember 2021	33
Tabel 11 Perbandingan Realisasi PNPB per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	34
Tabel 12 Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 13 Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan per Satker	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14 Rincian Pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021	35
Grafik 16 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021	35
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	36
Tabel 18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021	37
Tabel 19 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	37
Tabel 20 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021	37
Tabel 21 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	38
Tabel 22 Laporan Realisasi Anggaran Belanja dalam Rangka Pandemi COVID-19	Error! Bookmark not defined.
Tabel 23 Rincian Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 24 Rincian Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 25 Rincian Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 26 Rincian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 27 Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 28 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021	39
Tabel 29 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021	39

Tabel 30 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 31 Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 32 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 33 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan TA 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 34 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) per 31 Desember 2021.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 35 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 36 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 37 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	40
Tabel 38 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....	41
Tabel 39 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka	Error! Bookmark not defined.
Tabel 40 Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 per Satuan Kerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 41 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020.....	41
Tabel 42 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	42
Tabel 43 Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 44 Rincian Kesalahan Input IP per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 45 Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin Tahun 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 46 Rincian Pembelian Alat Kantor dan Rumah Tangga per satuan kerja per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 47 Rincian Pembelian Komputer per satuan kerja per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 48 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan pada Alat Kantor dan Rumah Tangga.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 49 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan pada Komputer	Error! Bookmark not defined.
Tabel 50 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 51 Rincian Koreksi Kesalahan input IP pada Mutasi Tamah.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 52 Rincian Koreksi Kesalahan input IP pada Mutasi Kurang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 53 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 54 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 55 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 56 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 57 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	44
Tabel 58 Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 59 Rincian Aset tak Berwujud Per Satker per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 60 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 61 Mutasi Aset lain-lain per 31 Desember 2021.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 62 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 63 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	45
Tabel 64 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 65 Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 66 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak per Jenis Penerimaan	46
Tabel 67 Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan TA 2021 per satuan kerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 68 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	47
Tabel 69 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan TA 2020	48
Tabel 70 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan TA 2020	48
Tabel 71 Rincian Beban Pemeliharaan per akun periode	49
Tabel 72 Rincian Beban Perjalanan Dinas per akun periode TA 2021 dan TA 2020	50
Tabel 73 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per Akun periode TA 2021 dan TA 2020	50
Tabel 74 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020	51
Tabel 75 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per Akun TA 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 76 Rincian Revaluasi Aset Tetap Per Satker TA 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 77 Perbandingan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 78 Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 79 Rincian Koreksi Lain-lain Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 80 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per Akun	54
Tabel 81 Perbandingan DDEL dan DKEL TA 2021 dan TA 2020	54
Tabel 82 Revisi Satker TA 2021	56
Tabel 83 Daftar Ralat SPM, SSBP dan SSPB TA 2021	57
Tabel 84 Penggantian Pejabat Perbendaharaan pada TA 2021	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Painan

Jl. Dr. Moh. Hatta 25611

Telp. 0756-21307 Fax. 0756-21707 e-mail : pa.painan@pta-padang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Painan terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 31 Desember 2021

Sekretaris,



Rahmel Fitri, SE.,SH.

NIP. 19830711.200604.1.001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Painan Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 705.672 atau mencapai 99,95 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp706.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp2.965.381.791 atau mencapai 99,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.975.666.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	706.000	705.672	99,95	581.418
Belanja Negara	2.975.666.000	2.965.381.791	99,65	2.965.133.304

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.211.066.781 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.137.160, Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.209.929.621 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp18.364.684 dan Rp3.192.702.097.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	1.137.160	2.257.000	(1.119.840)	(49,61)
Aset Tetap	3.209.929.621	3.369.140.799	(159.211.178)	(4,72)
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	3.211.066.781	3.371.397.799	(160.331.018)	(4,75)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	18.364.684	27.971.611	(9.606.927)	(34,34)
Jumlah Kewajiban	18.364.684	27.971.611	(9.606.927)	(34,34)
Ekuitas				
Ekuitas	3.192.702.097	3.343.426.188	(150.724.091)	(4,50)
Jumlah Ekuitas	3.192.702.097	678.004.208.362	34.172.003.189	5,04
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.211.066.781	3.371.397.799	(160.331.018)	(4,75)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp705.672, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.116.463.091 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.115.757.419. SurplusKegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit -LO sebesar Rp 3.115.757.419.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tanggal LO		Kenaikan (Penurunan)	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	705.672	581.418	124.254	21,37
Beban Operasional	3.116.463.091	3.182.997.602	(66.534.511)	(2,09)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(3.115.757.419)	(3.182.416.184)	66.658.765	2,09
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0,00
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	222.600	(222.600)	100,00
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	222.600	(222.600)	100,00
Pos Luar Biasa	0	0	0	0
Surplus (Defisit) – LO	(3.115.757.419)	(3.182.193.584)	66.436.165	2,08

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp3.343.426.188 dikurangi defisit-LO sebesar Rp3.115.757.419 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.965.033.328 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.3.192.702.097.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tanggal LPE		Kenaikan/Penurunan	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Rp	%
EKUITAS AWAL	3.343.426.188	2.577.729.038	765.697.150)	(29,70)
Surplus (Defisit) LO	(3.115.757.419)	(3.182.193.584)	66.436.165	2,08
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	0	0	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0	983.338.848	(983.338.848)	100,00
Transaksi Antar Entitas	2.965.033.328	2.964.551.886	481.442	0,01
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(150.724.091)	765.697.150	(916.421.241)	119,68
EKUITAS AKHIR	3.192.702.097	3.343.426.188	150.724.091	4,50

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Pendapatan Negara, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara dan Hibah, untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PAINAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	706.000	705.672	99,95	581.418
Jumlah Pendapatan Negara		706.000	705.672	99,95	581.418
B. Belanja Negara					
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	2.013.723.000	2.006.299.754	99,63	2.049.545.948
2. Belanja Barang	B.2.2.	924.443.000	922.321.237	99,77	890.603.556
3. Belanja Modal	B.2.3.	37.500.000	36.760.800	98,03	24.983.800
Jumlah Belanja Negara		2.975.666.000	2.965.381.791	99,65	2.965.133.304

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA PAINAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	1.137.160	2.257.000
Jumlah Aset Lancar		1.137.160	2.257.000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	954.182.000	954.182.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.201.855.007	2.165.094.207
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	2.197.400.000	2.197.400.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	27.834.470	27.834.470
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	64.409.299	64.052.090
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.235.751.155)	(2.039.421.968)
Jumlah Aset Tetap		3.209.929.621	3.369.140.799
Aset Lainnya	C.3		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	6.050.000	6.050.000
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	(6.050.000)	(6.050.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		3.211.066.781	3.371.397.799
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	18.364.684	27.971.611
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4. 2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.364.684	27.971.611
Jumlah Kewajiban		18.364.684	27.971.611
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	3.192.702.097	3.343.426.188
Jumlah Ekuitas		3.192.702.097	3.343.426.188
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		3.211.066.781	3.371.397.799

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA PAINAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kegiatan Operasional			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	705.672	581.418
JUMLAH PENDAPATAN		705.672	581.418
BEBAN			
Beban Pegawai	D. 2	1.994.867.754	2.060.977.948
Beban Persediaan	D. 3	33.956.340	30.241.660
Beban Barang dan Jasa	D. 4	623.215.584	589.047.626
Beban Pemeliharaan	D. 5	239.094.226	228.428.133
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	29.000.000	40.818.600
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	196.329.187	233.483.635
JUMLAH BEBAN		3.116.463.091	3.182.997.602
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.115.757.419)	(3.182.416.184)
Kegiatan Non Operasional			
SURPLUS/ (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	720.500

Uraian	Catatan	31 Desember2021	31 Desember2020
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	497.900
JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0	222.600
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D. 8	0	222.600
Surplus/ (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa		0	0
Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional		(3.115.757.419)	(3.182.193.584)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA PAINAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	3.343.426.188	2.577.729.038
Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.115.757.419)	(3.182.193.584)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E. 3	0	983.338.848)
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 3. 1.	0	15.691.500
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3. 2.	0	1.035.435.000)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3. 3.	0	(52.096.152)
Koreksi Lain-lain	E. 3. 4.	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	2.965.033.328	2.964.551.886
Ekuitas Akhir	E. 5	3.192.702.097	3.343.426.188

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum dan Peraturan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara / Lembaga;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
26. PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas APBN dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
27. Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-6/WPB.03/2022 tgl 5 Januari 2022 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian LK Th 2021 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Painan

Pengadilan Agama Painan bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dia juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Tugas pokok peradilan agama berdasarkan undang-undang tersebut adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pengadilan Agama Padang berkomitmen dengan visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Painan yang agung."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Painan melakukan langkah-langkah strategis berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan akseptibilitas putusan hakim.
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.
7. Meningkatkan kualitas SDM.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Painan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Painan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Painan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada UAPPA-W Pengadilan Agama Painan adalah pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

- Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Tahun 2020 dilakukan Tindak Lanjut Perbaikan Atas Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 sesuai surat edaran DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Hasil Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Penilaian Kembali atas objek yang belum dinilai pada tanggal 22 Juni 2020.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah

yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bi dang pengelolaan BMN/ BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2018 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar

hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang

yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangannomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Softwate computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasian Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset Lain-lain ini berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Satuan Kerja dilingkungan Koordinator Wilayah Pengadilan Agama Painan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian usulan estimasi pendapatan dengan DIPA, adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 8 Revisi Anggaran Tahun 2021

URAIAN	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	706.000	706.000
Jumlah Pendapatan	706.000	706.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.031.053.000	2.013.723.000
Belanja Barang	905.209.000	919.443.000
Belanja Modal	37.500.000	37.500.000
Jumlah Belanja	2.973.762.000	2.970.666.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total anggaran setelah revisi mengalami penurunan yang cukup besar terutama pada belanja Modal. Perubahan ini salah satunya disebabkan tahun 2021 Indonesia masih mengalami situasi Pandemi Covid-19, sehingga pemerintah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melakukan revisi pada beberapa anggaran belanja yang tidak mendesak atau belum terealisasi untuk digunakan pemerintah pusat dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Selama tahun 2021 tidak terdapat revisi akun untuk penanganan covid-19 pada satker Pengadilan Agama Painan.

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNB:
Rp705.672

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp705.672 atau mencapai 99,95 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp706.000. Keseluruhan Pendapatan Negara yang diterima oleh lingkup Pengadilan Agama Painan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan pada lingkup Pengadilan Agama Painan per 31 Desember 2021 berasal dari:

1. Pendapatan PNB Lainnya.
2. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN;
3. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN;
4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi PNB per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan PNB Lainnya	706.000	705.672	99.95
2.	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN;	706.000	705.672	99.95
3.	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	706.000	705.672	99.95
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	706.000	705.672	99.95
Total Pendapatan		706.000	705.672	99.95

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 21,37 persen dibanding realisasi pendapatan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya

penambahan harga sewa rumah dinas.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Realisasi TA 2021	RealisasiTA 2020	Naik (Turun) Rp	%
1. Pendapatan PNBP Lainnya					
425	Pendapatan PNBP Lainnya	705.672	581.418	124.254	21,37
2. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN;					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	705.672	581.418	124.254	21,37
3. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN					
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	705.672	581.418	124.254	21,37
4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	705.672	581.418	124.254	21,37
Total Pendapatan		705.672	581.418	124.254	21,37

Untuk Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp.705.672 merupakan pendapatan dari sewa rumah dinas

B.2. Belanja Negara

*Realisasi Belanja
Negara : Rp
2.960.381.791*

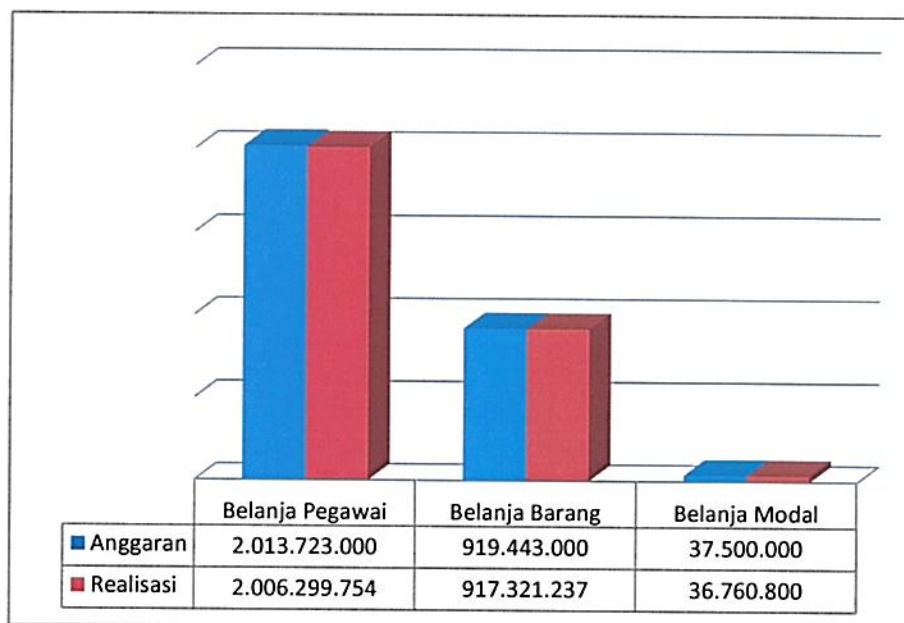
Realisasi Belanja instansi pada lingkup Pengadilan Agama Painan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.960.381.791 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,65 persen dari anggaran senilai Rp 2.970.666.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.013.723.000	2.006.299.754	99,63
Belanja Barang	919.443.000	917.321.237	99,77
Belanja Modal	37.500.000	36.760.800	98,03
Total Belanja Bruto	2.970.666.000	2.960.381.791	99,65
Pengembalian Belanja	0	(10.284.209)	0
Jumlah Belanja	2.970.666.000	2.960.381.791	99,65

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik12 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember2021
(dalam satuan Rupiah)



Realisasi belanjaTA 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,53 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2020. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan realisasi anggaran belanja yang lebih besar dari tahun lalu terutama pada belanja modal.

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.006.299.754	2.049.545.948	(43.246.194)	(1,99)
Belanja Barang	917.321.237	890.603.556	26.717.681	0,59
Belanja Modal	36.760.800	24.983.800	11.777.000	1,91
Total Belanja	2.960.381.791	2.965.133.304	81.740.875	4,49

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp
2.006.299.754

Realisasi Belanja Pegawai pada lingkup Pengadilan Agama Padang per 31 Desember 2021 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, serta Uang Makan. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp.2.006.299.754 setelah dikurangi pengembalian belanja atau 99,63 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2.013.723.000. Apabila dibandingkan dengan TA 2020, realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 43.246.194 atau 1,99 persen. Adapun realisasi Belanja Pegawai pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 2.049.545.948.

Hal ini disebabkan antara lain oleh mutasi pegawai keluar kabupaten dan serta tidak adanya realisasi belanja pegawai gaji ke 14 (THR) untuk Hakim dan pegawai di tahun 2021 ini.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Persentase
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.013.723.000	2.006.299.754	0	2.006.299.754	99,63
Jumlah Belanja	2.013.723.000	2.006.299.754	0	2.006.299.754	99,63

Perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.006.299.754	2.049.545.948	(43.246.194)	(1,99)
Jumlah Belanja Kotor	2.006.299.754	2.049.545.948	(43.246.194)	(1,99)
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0	(1,99)
Jumlah Belanja Netto	2.006.299.754	2.049.545.948	(43.246.194)	(1,99)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang : Rp
917.321.237*

Realisasi belanja Barang TA 2021 adalah sebesar Rp.917.321.237 setelah dikurangi pengembalian belanja atau 99,77 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.919.443.000. Apabila dibandingkan dengan TA 2020, realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,59 persen. Adapun realisasi Belanja Barang pada TA 2020 adalah sebesar Rp.890.603.556. Hal ini disebabkan karena kenaikan anggaran dan realisasi pada belanja barang operasional, belanja jasa dan belanja pemeliharaan guna mendukung kegiatan operasional perkantoran pada setiap satuan kerja.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Persentase
Belanja Barang Operasional	56.505.000	56.271.980	0	56.271.980	99,59
Belanja Barang Non Operasional	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,00
Belanja barang persediaan	42.230.000	42.230.000	0	42.230.000	100,00
Belanja Jasa	85.968.000	84.845.031	0	84.845.031	98,69
Belanja Pemeliharaan	229.888.000	229.700.726	0	229.700.726	99,92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	29.200.000	29.000.000	0	29.000.000	99,32
Jumlah Belanja	2.975.666.000	2.965.381.791	0	2.965.381.791	99,65

Perbandingan antara Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	56.271.980	502.035.785	(445.763.805)	0,10
Belanja Barang Non Operasional	5.000.000	0	5.000.000	(100,00)
Belanja barang persediaan	42.230.000	43.489.610	(1.259.610)	0,01
Belanja Jasa	84.845.031	87.513.478	(2.668.447)	1,99
Belanja Pemeliharaan	229.700.726	216.746.083	12.954.643	0,34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	29.000.000	40.818.600	(11.818.600)	1,79
Jumlah Belanja Kotor	917.321.237	890.603.556	26.717.681	0,59
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0	0
Jumlah Belanja	917.321.237	890.603.556	26.717.681	0,59

Pada masa pandemi COVID-19 Pengadilan Agama Painan yang mengalokasikan anggaran belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan jumlah Rp.5.000.000 yang digunakan untuk membeli alat atau kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19:

Rincian Jenis Belanja dan akun yang digunakan dapat dilihat di data dukung Laporan Keuangan ini.

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal:Rp
36.760.800*

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.36.760.800 setelah dikurangi pengembalian belanja atau 98,03 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.37.500.000. Apabila dibandingkan dengan TA 2020, realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.777.000,00 atau 12 persen. Adapun realisasi Belanja Modal pada TA 2020 adalah sebesar Rp.24.983.800.

Hal ini disebabkan oleh anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin tahun 2021 dua kali lebih besar dari tahun 2020, sehingga realisasinya pun menjadi lebih besar.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Persentase
Belanja Modal	37.500.000	36.760.800	0	36.760.800	
Peralatan dan Mesin					98,03
Jumlah Belanja	37.500.000	36.760.800	0	36.760.800	98,03

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.760.800	24.983.800	11.777.000	12.00
Jumlah Belanja Kotor	36.760.800	24.983.800	11.777.000	12.00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Jumlah Belanja	36.760.800	24.983.800	11.777.000	12.00

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp
1.137.160

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.137.160 dan Rp2.257.000. Turun sebesar Rp1.119.840 atau turun 49,61 persen dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada lingkup Koordinator Wilayah Pengadilan Agama Painan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 19 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Rp Naik/ (Turun)	% Naik/ (Turun)
Persediaan	1.137.160	2.257.000	1.119.840	49,61
Jumlah Total	1.137.160	2.257.000	1.119.840	49,61

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-

masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, tidak ada.

Rincian posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Rp Naik/ (Turun)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di
Muka: Rp 0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/ jasa belum diterima seluruhnya.

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp
1.137.160

Persediaan merupakan jenis aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.1.137.160 dan Rp.2.257.000, turun sebesar Rp.1.119.840 atau 49,61 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Rp Naik/ (Turun)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	1.007.160	2.218.000	(1.210.840)	(49,61)
Bahan Untuk Pemeliharaan	130.000	39.000	91.000	49,61
Total	1.137.160	2.257.000	(1.119.840)	(49,61)

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berjumlah Rp.1.137.160. Daftar BA Opname fisik pada Laporan Keuangan terlampir.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap: Rp
3.209.929.621*

Aset tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.3.209.929.621 dan Rp.3.369.140.799

Rincian Aset Tetap pada Pengadilan Agama Painan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 22 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Rp Naik/ (Turun)	% Naik/ (Turun)
Tanah	954.182.000	954.182.000	0	0,0
Peralatan dan Mesin	2.201.855.007	2.165.094.207	36.760.800	1,69
Gedung dan Bangunan	2.197.400.000	2.197.400.000	0	0,0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.834.470	27.834.470	0	0,0
Aset Tetap Lainnya	64.409.299	64.052.090	357.209	(0,55)
Jumlah Total	5.445.680.776	5.408.562.767	37.118.009	4,72
Akumulasi Penyusutan	(2.235.751.155)	(2.039.421.968)	(196.329.187)	9,62
Nilai Buku Aset Tetap	3.209.929.621	3.369.140.799	159.211.178	4,72

Penjelasan mengenai masing-masing jenis aset diatas akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp 954.182.000 Nilai Aset Tetap berupa Tanah pada Pengadilan Agama Painan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.954.182.000 dan Rp. 954.182.000. Tidak Terdapat kenaikan nilai aset Tanah.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 2.201.855.007 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 2.201.855.007 dan Rp.2.165.094.207. Terdapat kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp.36.760.800 atau 1,69 persen dari tahun sebelumnya.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 2.197.400.000 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.2.197.400.000 dan Rp. 2.197.400.000 Tidak Terdapat kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 27.834.470 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 27.834.470 dan Rp 27.834.470. Tidak Terdapat penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 1.355.698.138 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 64.409.299 dan Rp.64.052.090. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 357.209 atau 0,55 persen dari tahun sebelumnya.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (2.235.751.155) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp (2.235.751.155) dan Rp (2.039.421.968)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya: Rp 6.050.000 Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 6.050.000 dan Rp 6.050.000, tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya.

Rincian Aset Lainnya per Jenis Aset dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Rp Naik/ (Turun)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	6.050.000	6.050.000	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(6.050.000)	(6.050.000)	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka
Pendek: Rp
18.364.684*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga,. Nilai Kewajiban Jangka Pendek atau utang pihak ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.18.364.684 dan Rp.27.971.611, turun sebesar Rp.9.606.927 atau 34,34 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase
Utang kepada Pihak Ketiga	18.364.684	27.971.611	(9.606.927)	(34,34)
Jumlah	18.364.684	27.971.611	(9.606.927)	(34,34)

C.5. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp 3.192.702.097*

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.192.702.097 dan Rp 3.343.426.188, turun sebesar Rp.150.724.091 atau 4,50 persen dari tahun sebelumnya. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional periode TA 2021 disandingkan dengan Laporan Operasional periode TA 2020.

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak: Rp 705.672 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 705.672. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2020 sebesar Rp.581.418, maka terjadi kenaikan sebesar Rp.124.254 atau sebesar 21,37 persen.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per jenis penerimaan periode TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 25 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak per Jenis Penerimaan
Periode TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	NAIK/ (TURUN)	% NAIK/ (TURUN)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	705.672	581.418	124.254	21,37
TOTAL	705.672	581.418	124.254	21.37

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai: Rp 1.994.867.754 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah Beban

Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.994.867.754 dan Rp2.060.977.948. Saldo beban pegawai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.(66.110.194) atau sebesar (3,20) persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik / Turun (Rp)	Naik / Turun (%)
Beban Gaji Pokok PNS	821.940.520	902.978.200	(81.037.680)	(8,97)
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.712	13.530	(1.818)	(13,43)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	62.971.750	73.763.120	(10.791.370)	(14,62)
Beban Tunj. Anak PNS	22.547.488	24.607.872	(2.060.384)	(8,37)
Beban Tunj. Struktural PNS	33.180.000	33.180.000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	772.615.000	744.300.000	28.315.000	3,80
Beban Tunj. PPh PNS	76.657.024	68.973.506	7.683.518	11,13
Beban Tunj. Beras PNS	54.532.260	52.214.820	2.317.440	4,43
Beban Uang Makan PNS	146.452.000	156.577.000	(10.125.000)	(6,46)
Beban Tunjangan Umum PNS	3.960.000	4.369.900	(409.900)	(9,38)
Total Beban Pegawai	1.994.867.754	2.060.977.948	(66.110.194)	(3,20)

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
: Rp 33.956.340*

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.33.956.340 dan Rp.30.241.660. Saldo tersebut naik sebesar Rp.3.714.680 atau sebesar 12,28 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun) Rp	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	33.956.340	30.241.660	3.714.680	12,28
Total Beban Persediaan	33.956.340	30.241.660	3.714.680	12,28

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp 623.215.584

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 623.215.584 dan Rp 589.047.626. Saldo tersebut naik sebesar Rp.34.167.958 atau sebesar 5,80 persen dari tahun sebelumnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	435.199.000	435.395.000	(196.000)	0,04
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	834.500	946.500	(112.000)	(11,83)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39.240.000	39.240.000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	56.271.980	26.331.285	29.940.695	113,70
Beban Barang Non Operasional – Pandemi COVID-19	5.000.000	0	5.000.000	0.0
Beban Langganan Listrik	45.838.656	42.356.551	3.482.105	8,22
Beban Langganan Telepon	1.513.448	2.534.290	(1.020.842)	(40,28)
Beban Langganan Air	510.000	486.000	24.000	(4,93)
Beban Sewa	38.808.000	41.758.000	(2.950.000)	(7,06)
Total Beban Barang dan Jasa	623.215.584	589.047.626	34.167.958	5,80

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp 239.094.226 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp239.094.226 dan Rp.228.428.133. Saldo tersebut naik sebesar Rp.10.666.093 atau sebesar 4,66 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Pemeliharaan per akun periode
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.891.627	69.232.564	(9.340.937)	13,49
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	34.937.007	28.122.992	6.814.015	24,22
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134.872.092	119.390.527	15.481.565	12,96
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9.393.500	11.682.050	(2.288.550)	19,59
Total Beban Pemeliharaan	239.094.226	228.428.133	10.666.093	4,66

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp Rp29.000.000 Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah

masing-masing sebesar Rp29.000.000 dan Rp40.818.600. Saldo tersebut turun sebesar Rp.(11.818.600) atau sebesar (28,95) persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Perjalanan Dinas per akun periode TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	25.400.000	40.318.600	(14.918.600)	(37,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	500.000	3.100.000	620,00
Total Beban Perjalanan Dinas	29.000.000	40.818.600	(11.818.600)	(28,95)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
196.329.187

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp196.329.187 dan Rp.233.483.635. Saldo tersebut turun sebesar Rp.(37.154.448) atau sebesar (21,72) persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per Akun periode TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	133.832.193	170.986.641	(37.154.448)	(21,72)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62.079.882	62.079.882	0	0
Beban Penyusutan Jaringan	417.112	417.112	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	196.329.187	233.483.635	(37.154.448)	(21,72)

D.8. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non Operasional : Rp0 Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah Rp.0 dan Rp.222.600.

Rincian atas Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	720.500	720.500	100.00
Beban dari kegiatan non operasional	0	497.500	497.500	100.00
Total Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	222.600	222.600	100.00

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.343.426.188 dan Rp2.577.729.038.
Rp
3.343.426.188

E.2. Surplus/ (Defisit) LO

Surplus(defisit) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp (3.115.757.419) dan Rp (3.182.193.584).
LO : Rp
(3.115.757.41) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Dampak Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Kumulatif Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31
Perubahan Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp
Kebijakan 983.338.848.
Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Koreksi Yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas:
Rp.0

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Jumlah Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
Reklasifikasi: Rp 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0. Koreksi Atas
0 Reklasifikasi mencerminkan transaksi koreksi pencatatan aset berupa reklasifikasi

masuk dan reklasifikasi keluar terkait akun persediaan, aset tetap dan aset lainnya.

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset: Rp 0 Selisih Revaluasi Aset Tetap diperoleh dari penilaian ulang aset tetap. Revaluasi dapat diartikan sebagai penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Revaluasi dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp1.035.435.000

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi: Rp 0 Koreksi nilai aset non revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi, misalnya koreksi aset yang diakibatkan dari temuan BPK atau reklasifikasi antar Aset Teta yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat Aset Tetap. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.(52.096.152).

E.3.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain: Rp 0 Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi atas beban LO atas transaksi akrual belanja yang masih harus dibayar (utang kepada pihak ketiga) tahun 2021.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas : Rp 2.965.033.328 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.965.033.328 dan Rp 2.964.551.886. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL

dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per Akun
Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Akun	Transaksi Antar Entitas	2021	2020	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
313111	Ditagikan ke Entitas Lain	2.965.033.328	2.965.133.304	248.487	0,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	(705.672)	(581.418)	(124.254)	21,37
313211	Transfer Keluar	0	0	0	0
313221	Transfer Masuk	357.209	0	357.209	0,00
391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0
	Jumlah	2.965.033.328	2.964.551.886	481.442	0,01

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL):
Rp (705.672) / Rp 2.965.381.791

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp(705.672) sedangkan DKEL sebesar Rp2.965.381.791. Sedangkan perbandingannya per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 Perbandingan DDEL dan DKEL TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
DDEL	(705.672)	(581.418)
DKEL	2.965.381.791	2.965.133.304
Jumlah	2.964.676.119	295.964.551.886

E.4.2. Transfer Keluar / Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu

Masuk: entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.
Rp 0 /
Rp357.209 Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tidak ada. Sedangkan untuk Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp357.209, yang merupakan transfer masuk pada Pengadilan Agama Painan berupa buku dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung: Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tidak ada.
Rp 0

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir: Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.192.702.097 dan Rp3.343.426.188. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, Surplus/ Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas.
Rp 3.192.702.097

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Pada tahun 2021, BPK tidak ada melakukan audit terhadap Satuan Kerja.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Painan adalah sebanyak 1 rekening bendahara pengeluaran. Daftar rekening pemerintah sebagaimana terlampir pada data dukung Laporan Keuangan ini.

F.2.3. Revisi DIPA

Berikut uraian Revisi satker yang terjadi dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 pada Pengadilan Agama Painan dapat dirincikan pada tabel berikut ini :

Tabel 28 Revisi Satker TA 2021

No	Satker	Revisi Ke	Tanggal	Digital Stamp	Keterangan
1	Pengadilan Agama Painan	1	10 Juli 2021	DS:8230-3283-1471-1056	Halaman 3
		2	07 Oktober 2021	DS:8230-3283-1471-1056	Halaman 3 dan Perubahan POK
		3	18 November 2021	DS:0187-0165-8168-6407	Halaman 3, Perubahan POK, Pemotongan Anggaran.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Daftarralat SPM, SSBP, dan SSPB pada satker dilingkungan Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29 Daftar Ralat SPM

No	Satker	Keterangan
1.	PA Painan	- Terdapat ralat SPM nomor 00103 tanggal 14 Oktober 2021 dengan nomor SP2D 211421301003032 tanggal 14 Oktober 2021 yang disebabkan salah kode pada kode akun pada : • kegiatan 1066.EAA.002 yang semula 522111 sebesar Rp. 13.000.000 menjadi akun 521111 sebesar Rp. 13.000.000

F.2.5. Monitoring Aplikasi e-Rekon&LK

Pada monitoring aplikasi e-rekon&LK per tanggal 30 April 2021 tidak terdapat selisih/penyajian sampai pada periode Desember.